PERAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MAROKO DAN SAHARA BARAT TAHUN 2010-2012

MARLISA AUDYA PUTRI¹

NIM. 06.54013.08288.02

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the UN in conflict resolution between Morocco and Western Sahara after the failure of Manhasset Agreement for 2007-2009.

This study used a descriptive analytic type is to describe the role of the UN in conflict resolution between Morocco and Western Sahara. Types and sources of data in this study are secondary data through indirect studies. Data collection techniques in this study is through indirect studies by literature review of the literature such as books, journals. Articles, magazines, and others. Engineering analysis of data from this study is the analysis of qualitative data.

This study shows that the UN seek to resolve the conflict between Morocco and the Western Sahara to hold peace talks in 2009, but the negotiations failed because both parties to the conflict remain concerned with the options of each country the recent UN is working on a new framework agreement for resolve the conflict, also sent peacekeepers to the area called MINURSO conflict while continuing to extend the mandate of MINURSO until April 2014 and will continue to be extended until the conflict ended.

Key word: Role, Resolution Conflict

Pendahuluan

Maroko seperti yang kita ketahui adalah sebuah negara yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Namun, Maroko telah menyimpan konflik selama lebih

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email: audya_putri@yahoo.com

dari 30 tahun dengan Sahara Barat. Sahara Barat yang luasnya sama dengan Inggris terletak di barat laut benua Afrika, letaknya di sepanjang pesisir samudera Atlantik dan dibatasi oleh Maroko di sebelah utara, Aljazair di sebelah timur laut dan Mauritania di Selatan dan Tenggara. (Hope for Western sahara, terdapat di http://lulukuh.Blogspot.com, diakses tanggal 08 Oktober 2010)

Sahara Barat merupakan peninggalan kolonialisme Eropa tahun 1880 sampai dengan tahun 1990 dimana pada era tersebut, negara-negara utama di Eropa saling bersaing untuk mendapatkan wilayah Afrika. Saat itu, Spanyol mendapatkan wilayah Sahara Barat dan melakukan kolonisasi di Sahara Barat. Namun, saat itu Spanyol sebagai negara Eropa yang paling lemah, sehingga Spanyol hanya mendapatkan separuh dari wilayah Sahara Barat, sedangkan Perancis mendapatkan Maroko, Mauritania, dan Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat. Sahara Barat memiliki banyak sumber-sumber mineral termasuk fosfat dan bijih besi, wilayah ini pun merupakan salah satu lahan perikanan terbaik di dunia sehingga spanyol pun mendapatkan keuntungan ketika menguasai Sahara Barat.

Karena kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol, maka kelompok yang mendukung kemerdekaan di Sahara barat pada tahun 1973 mendirikan gerakan Polisario sebagai gerakan pembebasan Sahara Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari Spanyol.gerakan ini mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat setempat dan karena kuatnya dukungan masyarakat pada gerakan Polisario, maka membuat tentara Spanyol mundur dari Sahara Barat pada tahun 1975. Dengan demikian, perjuangan gerakan Polisario yang telah membuat mundur Spanyol berakhir dan gerakan Polisario kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR). Namun, dengan berdirinya SADR ternyata belum membuat masalah di Sahara Barat berakhir karena ternyata Spanyol menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania dengan imbalan tertentu termasuk mengeksploitasi ikan di lepas pantai dan menambang fosfat, tetapi kesepakatan tersebut terlampau rahasia sehingga publik dan media pun tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut.

Beberapa tahun kemudian, karena tekanan dari sejumlah pihak luar pada tahun 1979 Mauritania mundur dari Sahara Barat, sehingga hanya Maroko saja yang menjadi koloni tunggal di Sahara Barat. (Sejarah Masehi, terdapat di http://www2. irib. ir/worldservice/meiayuradio/kal sejarah/masehi/mei/10mei html, diakses pada tanggal 10 Mei 2013)

Rakyat Sahara Barat kembali mengalami penjajahan akibat pendudukan Maroko di Sahara Barat dimana Maroko melakukan invasi yang brutal pada rakyat Sahara Barat yang tetap tinggal di tanah air dimana mereka senantiasa ditahan, dipenjara, dan diculik oleh angkatan pendudukan Maroko. Mereka yang ingin melarikan diri dihalangi oleh tembok sepanjang 2.700 Km yang membelah Sahara Barat dalam zona pesisir yang diduduki Maroko dan bagian dalam yang dikuasai Republik Saharawi. Selain itu, ditanam lebih dari 3 juta ranjau darat dan ditempatkannya

120.000 tentara Maroko di Sahara Barat. (Maroko dan Sahara Barat, terdapat di http://bataviase.co.id/node/30050, diakses pada tanggal 12 April 2010)

Pada tahun 2007, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadakan perundingan Manhasset untuk menengahi konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat, perundingan Manhasset diadakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak empat putaran, setelah perjanjian tersebut dapat kita lihat bahwa beberapa bulan kemudian terlihat adanya pencerahan yaitu dihasilkannya perjanjian untuk meneruskan langkah-langkah membangun kepercayaan terbatas, seperti kunjungan antar keluarga-keluarga yang terpisahkan oleh konflik dan untuk meningkatkan langkah pembicaraan selanjutnya.

Pada awalnya dapat kita lihat bahwa perundingan Manhasset dianggap cukup efektif untuk meningkatkan perdamaian diantara Maroko dan Sahara Barat, tetapi pada akhirnya kedua negara tersebut kembali berperang karena ternyata kedua negara tersebut melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang diadakan PBB, dimana Maroko kembali ingin menguasai Sahara Barat sedangkan Sahara Barat menginginkan kemerdekaan penuh untuk mendirikan negara Sahara Barat. Sehingga perundingan Manhasset tersebut dianggap gagal untuk menciptakan perdamaian diantara kedua negara tersebut.

Penulis memilih judul "Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam penyelesaian konflik antara Maroko dan Sahara Barat tahun 2010 - 2012) karena penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat yang menjadi penyebab utama konflik tersebut dapat terjadi karena konflik tersebut melibatkan negara muslim, sebab seperti yang kita ketahui bahwa sangat jarang terjadi melihat megara muslim menginvasi sesama bangsa muslim dan meneruskan kolonisasi Spanyol periode tahun 1884 sampai dengan tahun 1975 dan penulis pun ingin meneliti hal-hal yang menyebabkan konflik antara Maroko dan Sahara Barat sulit terselesaikan, sekaligus meneliti peran dan tindakan yang dilakukan oleh PBB pasca gagalnya perundingan Manhasset yang diadakan pada tahun 2007 hingga tahun 2009 yang berlangsung sebanyak empat putaran.

Kerangka Dasar Konsep 1. Teori Konflik

Menurut K.J Holsti,beberapa definisi mengenai konflik yaitu pertama, situasi dimana para warga negara pribadi di suatu negara menjadi terlibat dalam suatu pertikaian dengan pemerintah lain atau warga negara lain mengenai sejumlah isu dan kemudian meminta pemerintahannya sendiri memberikan perlindungan atau ganti rugi kepada mereka dapat disebut "perselisihan". Kedua, definisi kita mengenai konflik dan krisis tidak mencakup apa yang mungkin disebut persaingan internasional. (Holsti, K. J, 1983, hal 170)

Bidang Isu dalam Konflik Internasional

Dalam beberapa kasus, konflik melibatkan sangat banyak tujuan berlawanan sehingga tidak mungkin untuk menyebutkan salah satu diantaranya memiliki arti

yang penting dan utama. Berdasarkan studi atas berbagai konflik ini, maka terdapat enam tipe utama tujuan negara atau sumber konflik, yaitu :

- 1. Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh satu negara di atau dekat wilayah negara lain.
- 2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah.
- 3. Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga.
- 4. Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan.
- 5. Konflik pembebasan, atau perang revolusioner yang dilakukan suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis.
- 6. Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk memepersatukan suatu negara yang pecah.

Konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat termasuk dalam konflik wilayah terbatas karena Maroko ingin mengambil alih wilayah Sahara Barat yang dulunya di jajah oleh Spanyol tetapi Maroko juga memilik kepentingan atas Sahara Barat yaitu karena Sahara Barat kaya akan sumber-sumber mineral dan juga merupakan lahan perikanan terbaik di dunia.

2. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik yaitu setiap bentuk akhir dari suatu konflik tanpa mempermasalahkan bagaimana bentuk akhir dari konflik tersebut diperoleh. Hal ini berarti bahwa akibat dari konflik juga merupakan Resolusi Konflik. Berikut ini adalah beberapa bentuk dari Resolusi Konflik, yaitu: (Holsti, K. J, 1983, hal 185)

- a. Penghindaran diri
- b. Penaklukkan
- c. Penundukkan atau Penangkalan
- d. Kompromi
- e. Imbalan
- f. Penyelesaian Pasif

Konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat telah memasuki tahap penyelesaian konflik yaitu kompromi, dimana antara Maroko dan Sahara Barat sedang berupaya untuk menarik kembali tujuannya dan juga tindakan masingmasing pihak yang telah menimbulkan konflik, namun nampaknya masih cukup sulit bagi kedua pihak untuk menyadari bahwa jika konflik diteruskan akan mengalami kerugian yang lebih besar, seperti yang kita ketahui bahwa Maroko sangat menginginkan agar Sahara Barat menjadi wilayah otonominya berdasarkan atas kesepakatan rahasia antara maroko dan rezim diktator Spanyol, ketika Spanyol mengakhiri penjajahannya di Sahara Barat, namun sebaliknya Sahara Barat menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya karena rakyat Sahara Barat tidak ingin mengalami penindasan kembali seperti ketika dijajah oleh Spanyol.

3. Pendekatan Manajemen Konflik

Dapat kita lihat bahwa pendekatan manajemen konflik terdiri dari empat bagian yaitu: (Pamela Aall, Fen Osler Hampson, Chester A. Crocker, 2001, hal 428)

- a. Realisme Keras (Hard Realism)
- b. Realisme yang lunak.
- c. Pendekatan dasar oleh Pemerintah
- d. Pendekatan Psikologi Sosial

Pendekatan manajemen konflik yang digunakan untuk meneliti konflik antara Maroko dan Sahara Barat adalah pendekatan realisme yang lunak yaitu dengan mediasi oleh PBB sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam konflik tersebut. PBB berperan menjaga perdamaian di dunia khususnya dalam konflik yang terjadi di Sahara Barat, PBB pun selalu berusaha membangun kepercayaan pada pihakpihak yang bertikai agar tidak ada yang berusaha untuk mengganggu perjanjian negosiasi yang diadakan oleh PBB demi menyelesaikan konflik tersebut.

4. Motif Mediator

Negara menggunakan mediasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Intervensi mereka sebagai mediator adalah mensahkan kepentingan mengurangi konflik. Mediator jarang tidak mengubah cara negosiasi mereka. Tidak terlalu mengejutkan bahwa mereka mencoba untuk menghindari syarat-syarat yang tidak mengikuti kepentingan mereka, meskipun kepentingan mediator biasanya mengikuti berbagai hasil dari kepentingan partai. Motivasi kepentingan pribadi memegang kekuatan besar, menengah dan Organisasi Internasional.

Ada beberapa macam mediasi, yaitu:

1. Mediasi oleh Negara

Mediasi oleh negara dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika, Uni Soviet dan lain-lain dimana ketika terjadi konflik di suatu negara maka negara yang besar pun akan turu sebagai mediator diantara pihak yang bertikai.

2. Mediasi oleh kekuatan kecil dan menengah

Mediasi oleh kekuatan kecil dan menengah biasanya dilakukan oleh negara seperti India yang menjadi mediator Sri Lanka, negara Libya memediasi konflik di Afrika dan lain-lain.

3. Mediasi oleh Organisasi Internasional

Mediasi ini dilakukan oleh organisasi regional seperti OAU, ASEAN, APEC, dan juga oleh organisasi Internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Mediasi yang dilakukan dalam konflik Maroko menggunakan mediasi oleh Organisasi Internasional, karena organisasi PBB berperan besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat, dimana dapat kita ketahui bahwa pada tahun 1991 PBB mengadakan perjanjian gencatan senjata untuk meredam konflik diantara kedua pihak yang bertikai, namun perjanjian gencatan senjata pun ternyata tidak berpengaruh pada konlik tersebut, kemudian PBB mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk melakukan perundingan salah satunya yaitu perundingan Manhasset yang berlangsung selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

5. Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional yaitu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. (May Rudi. T, 2001 hal 53)

- a. Bentuk Perjanjian Internasional
- 1. *Treaty*
- 2. Konvensi
- 3. Protokol
- 4. Arrangement
- 5. Proses Verbal
- 6. Statuta
- 7. Deklarasi
- 8. Modus Vivendi
- 9. Pertukaran Nota atau Surat
- 10. Ketentuan Penutup (Final Act)
- 11. Ketentuan Umum

Bentuk Perjanjian Internasional yang digunakan dalam meredam konflik antara Maroko dan Sahara Barat adalah dalam bentuk *treaty* karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut bersifat menyeluruh bagi para peserta perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral.

- b. Tahap-tahap membuat Perjanjian Internasional
- 1. Perundingan (negotiation)
- 2. Penandatanganan (signature)
- 3. Ratifikasi
- 4. Hal Berakhirnya Perjanjian Internasional
- a. Karena telah mencapai tujuan perjanjian tersebut.
- b. Karena habis waktu berlakunya perjanjian tersebut.
- c. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu.
- d. Karena ada persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
- e. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu.
- f. Karena dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri.
- g. Diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

6. Konsep Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan

tercapainya tujuan-tujuan yang diperlikan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy May. Tengku, 2005, hal 27)

Perkembangan hubungan Internasional yang lebih menekankan pada pola kerjasama melalui organisasi Internasional, semakin menonjolkan peran organisasi Internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan didalam bentuk-bentuk kerjasama Internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi Internasional non-pemerintah yang semakin banyak jumlahnya.

Dari penjelasan tersebut diatas secara umum organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan juga melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuantujuan yang diperlukan dan disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

- 1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
- 2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
- 3. Melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup, melindungi tempat-tempat bersejarah dan menjaga perdamaian (*peace keeping*).

Sesuai dengan tujuan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional maka dalam konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat, Organisasi Internasional seperti PBB berperan dalam konflik tersebut dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang mengawasi berlangsungnya referendum yang terjadi diantara kedua pihak yang bertikai yang dinamakan MINURSO, MINURSO selain dikirimkan untuk mengawasi referendum juga dikirimkan untuk mencegah terjadinya kontak senjata di kawasan tersebut, PBB juga mengadakan beberapa kali perjanjian resmi dan tidak resmi di Manhasset, New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Hasil Penelitian

Terjadinya konflik antara Maroko dan Sahara Barat tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lalu serta keadaan alami kedua negara tersebut. Konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan bersifat akumulatif. Sahara Barat merupakan peninggalan kolonialisme Eropa tahun 1880 sampai dengan tahun 1990 dimana pada era tersebut, Negaranegara utama di Eropa saling bersaing untuk mendapatkan wilayah Afrika. Saat itu, Spanyol mendapatkan wilayah Sahara Barat dan melakukan kolonisasi di Sahara Barat.

Namun, saat itu Spanyol sebagai negara Eropa yang paling lemah, sehingga Spanyol hanya mendapatkan separuh dari wilayah Sahara Barat, sedangkan Perancis mendapatkan Maroko, Mauritania, dan Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat. Sahara Barat memiliki banyak sumber-sumber mineral termasuk fosfat dan bijih besi, wilayah ini pun merupakan salah satu lahan perikanan terbaik di dunia sehingga spanyol pun mendapatkan keuntungan ketika menguasai Sahara Barat.

Karena kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol, maka kelompok yang mendukung kemerdekaan di Sahara barat pada tahun 1973 mendirikan gerakan Polisario sebagai gerakan pembebasan Sahara Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol. Gerakan ini mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat setempat dan karena kuatnya dukungan masyarakat pada gerakan Polisario, maka membuat tentara Spanyol mundur dari Sahara Barat yang didasarkan pada Kesepekatan Madrid pada tahun 1975 yang juga diteken oleh Spanyol, Maroko, dan Mauritania.

Dengan demikian, perjuangan gerakan Polisario yang telah membuat mundur Spanyol berakhir dan gerakan Polisario kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR). Namun, dengan berdirinya SADR ternyata belum membuat masalah di Sahara Barat berakhir karena ternyata pasca penarikan (militer) Spanyol menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania dengan imbalan tertentu termasuk mengeksploitasi ikan di lepas pantai dan menambang fosfat, tetapi kesepakatan tersebut terlampau rahasia sehingga publik dan media pun tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut.

Maroko langsung mengambil alih Saguia El Hamra,sedangkan Mauritania menguasai Rio De Oro yang merupakan wilayah Sahara Barat bekas jajahan Spanyol. Beberapa tahun kemudian, karena tekanan dari sejumlah pihak luar dan melalui aksi militer pada tahun 1979 Mauritania mudur dari Sahara Barat dan mengakui kemerdekaan Sahara Barat sehingga sempat menimbulkan perpecahan antara Mauritania dan Maroko, kemudian Maroko bukannya melepas El Hamra justru mengklaim dan menganeksasi secara sepihak wilayah Rio De Oro yang ditinggalkan oleh Mauritania dan sekitar 20-25 % wilayah menjadi kekuasaan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) dan selebihnya dikendalikan oleh Maroko. Hal inilah yang membuat Front Polisario bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan di Sahara Barat.

PBB berperan menjaga perdamaian di dunia khususnya dalam konflik yang terjadi di Sahara Barat, PBB pun selalu berusaha membangun kepercayaan pada pihakpihak yang bertikai agar tidak ada yang berusaha untuk mengganggu negosiasi yang diadakan oleh PBB demi menyelesaikan konflik tersebut. Peran PBB dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat dapat kita jabarkan sebagai berikut:

1. Menjaga perdamaian dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi jalannya referendum yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bertikai yang disebut dengan MINURSO (*The United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara*). Pada tahun 1991, PBB datang untuk menengahi konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat ke kawasan Sahara Barat dan kedua pihak yang bertikai sepakat menyerahkan nasib kawasan Sahara Barat pada sebuah referendum, kemudian PBB pun mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 690 pada 29 April tahun 1991 dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian MINURSO sekaligus mengawasi jalannya proses referendum diantara kedua pihak yang bertikai.

Hasil dari referendum tersebut, yaitu dicapainya sebuah kesepakatan diadakannya perjanjian gencatan senjata untuk meredam konflik yang terjadi, tetapi kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut hingga pada akhirnya kontak senjata pun kembali terjadi yang membuat korban kembali berjatuhan. PBB pun tetap mengutus MINURSO untuk terus mengawasi bahkan meminimalisir frekuensi kontak senjata tersebut. MINURSO dihadirkan di kawasan ini untuk dapat membantu mengembalikan semangat hidup pada rakyat akibat dari konflik tersebut, dan pasukan penjaga perdamaian ini juga dipersiapkan untuk menerima batasan-batasan sosial dalam kehidupan pribadi dan publik demi menjalankan misi yang dimandatkan pada mereka. Dalam menjalankan misinya, pasukan penjaga perdamaian diharapkan dapat menjaga segala tingkah lakunya dengan sangat baik karena masyarakat Internasional akan secara ketat mengawasinya, dalam segi positif maupun negatif yang dilakukan pasukan penjaga perdamaian akan sangat memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan misinya.

Dalam menjalankan misinya sebagai penjaga perdamaian, maka pasukan penjaga perdamaian harus sesuai dengan piagam PBB juga ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga hukum perikemanusiaan Internasional dimana didalamnya termaktub kode-kode etik serta norma-norma sebagi standarisasi yang harus dipatuhi terutama landasan dasar yaitu hak asasi manusia. Pasukan penjaga perdamaian harus dapat membawa nama baik PBB dan juga negaranya dan sejauh ini pasukan penjaga perdamaian telah mampu berfungi sesuai mandat yang diberikan.

Mandat MINURSO adalah sebagai berikut:

- 1. Mengawasi berjalannya gencatan senjata
- 2. Melakukan verifikasi atas kesepakatan pengurangan pasukan Maroko di wilayah sengketa
- 3. Mengawasi pembatasan pasukan Maroko dan Polisario di lokasi-lokasi yang telah ditentukan
- 4. Memastikan pelepasan tahanan-tahanan politik Sahara Barat
- 5. Mengatur pertukaran tawanan perang yang ditentukan oleh *International Committee of The Red Cross* (ICRC)
- 6. Memulangkan pengungsi-pengungsi Sahara Barat
- 7. Mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk Sahara Barat untuk persiapan referendum

- 8. Mengorganisir dan memastikan sebuah referendum adil dan bebas dan mengumumkan hasilnya
- 9. Mengurangi ancaman dari ranjau tambang serta ranjau dan artileri-artileri yang belum meledak

Dalam keterlibatan PBB pada saat menengahi konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat, PBB telah beberapa kali memperpanjan mandat MINURSO di area konflik dan mandat MINURSO pun akan diperpanjang hingga bulan April tahun 2014 yang kemudian akan terus diperpanjang selama konflik antara Maroko dan Sahara Barat belum berakhir.

Hal ini dapat kita lihat bahwa peran organisasi Internasional cukup signifikan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di kawasan konflik walaupun konflik yang terjadi berlangsung cukup lama dan sampai saat ini pun belum berakhir, tetapi PBB tetap memperpanjang mandatnya untuk tidak menarik pasukan penjaga perdamaian di area konflik walaupun tidak diketahui entah sampai kapan konflik tersebut berakhir karena PBB ingin mewujudkan misinya yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia.

2. Upaya perundingan damai

Setelah PBB memasuki wilayah sengketa, telah dilaksanakan beberapa kali perundingan yang belum dapat menghasilkan sesuatu yang berarti. Sejak gagalnya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1991 antara Maroko dan Sahara Barat, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 1754 untuk mengadakan mengadakan perundingan Manhasset pertama kali di New York, Amerika Serikat. PBB telah mengadakan beberapa kali perjanjian resmi dan tidak resmi antara Maroko dan Sahara Barat, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 setidaknya telah diadakan sekitar empat putaran perjanjian yang membahas tentang perdamaian yang diinginkan oleh kedua pihak yang bertikai.

PBB pertama kali mengadakan perjanjian Manhasset di New York, Amerika yaitu pada bulan Juni tahun 2007, pada saat itu kedua belah pihak menyampaikan opsi masing-masing yaitu Sahara Barat menginginkan kemerdekaan penuh atas wilayahnya dan Maroko menginginkan Sahara Barat berintegrasi dengan Maroko tetapi Maroko berjanji akan menberika otonomi khusus pada Sahara Barat untuk mengurusi wilayahnya sendiri, kemudian hasil dari perjanjian ini ternyata tidak menemukan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap mementingkan opsi masing-masing tanpa memperdulikan korban-korban yang sudah berjatuhan akibat konflik ini dan akhirnya perjanjian ini dianggap gagal. Kemudian, diadakan kembali perjanjian Manhasset di New York, Amerika Serikat pada bulan Agustus tahun 2007, dan juga belum dapat membuahkan hasil sehingga diadakan kembali perundingan yang ketiga pada bulan Januari tahun 2008 tetapi hasilnya juga belum terlihat sehingga harus diadakan kembali perundingan yang keempat pada bulan Maret tahun 2009.

Setelah PBB mengadakan empat kali perundingan di Manhasset, New York, Amerika Serikat, nampaknya kedua pihak yang bertikai tetap menginginkan agar

pendapatnya masing-masing menjadi opsi untuk perdamaian yang akan terjadi walaupun telah membuat banyak korban berjatuhan tetap tidak merubah pendirian mereka karena seharusnya pihak yang bertikai menyadari bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada apa yang selama ini mereka pertahankan yaitu Maroko yang menginginkan agar Sahara Barat menjadi wilayah otonominya tetapi diberikan otonomi khusus untuk Sahara Barat untuk mengatur wilayahnya, sedangkan Sahara Barat tetap menginginkan kemerdekaan penuh atas wilayah Sahara Barat karena tidak ingin mengalami penjajahan kembali seperti yang pernah dilakukan oleh Spanyol dan juga tidak ingin negara lain menguasai dan mengeksplorasi sumber-sumber mineral yang ada di wilayah Sahara Barat.

Pasca diadakannya beberapa kali perjanjian Manhasset, belum juga terlihat hasil yang signifikan pada perdamaian yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat maka PBB pun saat ini tengah berusaha merancang kerangka perjanjian baru yang akhirnya dapat diterima oleh kedua pihak yang bertikai agar pada akhirnya dapat tercipta perdamaian yang abadi.

Kesimpulan dan Saran a. Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat telah berlangsung cukup lama yaitu sekitar lebih dari 30 tahun lamanya. Pada era tahun 1880 sampai dengan tahun 1990, negara-negara utama di Eropa saling bersaing untuk mendapatkan wilayah di Sahara Barat dan melakukan kolonisasi di Sahara Barat.

Karena pada saat itu Spanyol adalah negara Eropa yang paling lemah maka Spanyol hanya mendapatkan separuh dari wilayah Sahara Barat, sedangkan Perancis mendapatkan Maroko, Mauritania, dan Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat. Sahara Barat merupakan daerah yang akan sumber-sumber mineral termasuk fosfat dan bijih besi dan merupakan salah satu lahah perikanan terbaik di dunia, hal ini memberikan keuntungan bagi Spanyol ketika menguasai Sahara Barat dan ini pula alasan mengapa Sahara Barat banyak diperebutkan oleh negara lain.

Akibat dari penjajahan Spanyol maka kelompok yang mendukung terjadinya kemerdekaan di kawasan Sahara Barat mendirikan gerakan Polisario pada tahun 1973, karena kuatnya dukungan dari masyarakat terhadap gerakan Polisario maka membuat tentara Spanyol mundur dari Sahara Barat pada tahun 1975. Kemudian, gerakan Polisario memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Arab Saharawi (SADR). Tetapi ternyata Spanyol belum juga jera dan malah menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania dengan imbalan yaitu mengeksploitasi ikan di lepas pantai dan menambang fosfat, tetapi kesepakatan yang diadakan antara Spanyol, Maroko dan Mauritania terlampau rahasia sehingga publik dan media pun tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut. Akibat dari tekanan sejumlah pihak luar, maka pada tahun 1979 Mauritania mundur dari Sahara Barat sehingga tersisa Maroko saja yang menjadi koloni tunggal di Sahara Barat.

Sepeninggal Mauritania, Maroko melakukan invasi yang brutal terhadap rakyat Sahara Barat yang tetap tinggal di Sahara Barat, mereka ditahan, dipenjara, dan diculik oleh tentara Maroko dan rakyat Sahara Barat yang ingin melarikan diri dihalangi oleh tembok sepanjang 2.700 Km yang membelah Sahara Barat dalam zona pesisir yang diduduki Maroko dan bagian dalam yang dikuasasi Republik Saharawi dan juga ditanam lebih dari 3 juta ranjau darat dan ditempatkannnya 120.000 tentara Maroko di Sahara Barat.

Benturan kepentingan antara Maroko dan Sahara Barat yang sudah tidak dapat diselesaikan secara baik oleh kedua negara melalui jalur diplomatik sebagai jalur pertama dalam resolusi konflik telah memaksa PBB sebagai badan Internasional untuk campur tangan dalam proses penyelesaian konflik antara Maroko dan Sahara Barat tersebut.

Dalam upaya penyelesaian konflik antara Maroko dan Sahara Barat, selain mengupayakan diadakannya perundingan damai, PBB juga mendatangkan pasukan penjaga perdamaian yang khusus dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah konflik Maroko dan Sahara Barat sekaligus mengawasi jalannya referendum diantara kedua pihak yang bertikai yang disebut MINURSO (The United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara).

Kedatangan pasukan MINURSO di wilayah sengketa selain keberadaannya difokuskan untuk mencegah terulangnya konflik bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakannya referendum untuk menyelesaikan konflik antara Maroko dan Sahara Barat juga untuk membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang timbul akibat perang antara Maroko dan Sahara Barat.

Dalam misinya untuk menjaga perdamaian dunia, selain menurunkan pasukan MINURSO PBB juga mengadakan beberapa kali perjanjian untuk meredam konflik kedua belah pihak. Perjanjian tersebut diadakan di Manhasset, New York, Amerika Serikat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tetapi masih saja kedua pihak yang bertikai tetap mempertahankan keinginan masing-masing tanpa mempedulikan akibat dari konflik tersebut yang telah merugian kedua pihak dan memakan korban jiwa yang cukup banyak. PBB saat ini tengah merancang kerangka perjanjian baru agar akhirnya perjanjian tersebut dapat diterima oleh kedua pihak yang bertikai dan juga memperpanjang mandat pasukan MINURSO di kawasan Sahara Barat hingga bulan April tahun 2014.

b. Saran

Konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat merupakan konflik cukup lama yang belum terselesaikan yaitu hampir 37 tahun lamanya. Wilayah Sahara Barat memang menjadi perebutan beberapa negara karena kaya akan sumbersumber mineral seperti fosfat dan bijih besi dan juga merupakan lahan perikanan terbaik di dunia. Keinginan Sahara Barat untuk merdeka dan tidak ingin dikuasi oleh Maroko adalah hal yang lumrah karena Sahara Barat ingin mempertahankan sumber-sumber mineral yang dimilikinya dan tidak ingin negara lain mengeksploitasinya. Maroko yang ingin menguasai wilayah Sahara Barat dengan memberikan otonomi khusus pada Sahara Barat memang kemungkinan membuat Sahara Barat ragu untuk menjadi bagian dari Sahara Barat kerena Sahara Barat

tudak ingin mengalami penjajahan seperti yang dilakukan oleh Spanyol, Sahara Barat juga takut jika sudah menjadi bagian dari Maroko maka Maroko akan mengeksploitasi secara besar-besaran sumber mineral di Sahara Barat hingga akhirnya banyak Negara-negara yang akan mengintervensi Sahara Barat.

Para pembuat kebijakan diharapkan dapat melihat apa yang telah dialami oleh Sahara Barat dan mendukung terjadinya kemerdekaan di wilayah Sahara Barat karena Sahara Barat tidak ingin mengalami kembali penindasan seperti yang pernah dilakukan oleh Spanyol. Jika memang Maroko ingin menguasai Sahara Barat hendaklah tidak sekedar janji untuk memakmurkan rakyat Sahara Barat tetapi disertai dengan tindakan nyata, Maroko harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens agar rakyat Sahara Barat pun akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan konflik yang terjadi dan lebih mengedepankan masa depan rakyat Sahara Barat.

Referensi

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2005.
- Assefa, Hiskias. Mediation of Civil Wars. Wetview Press. Boulder, Colon. 1987.
- Baker, James A., III, 1999. "The Road to Madrid." In Herding Cats, ed. Crocker, Hampson, and Aall.
- K.J.Holsti, *International Politic*, Diterjemahkan oleh M. Tahir Azhary," *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*", Edisi ke 4, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodelogi*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1990.
- Pamela Aall, Fen Osler Hampson, Chester A. Crocker, "Turbulent Peace The Challenges of Managing International Conflict", United States Institute of Peace, Washington, DC, 2001.
- Rudi, T. May. *Hukum internasional II*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Rudi, T. May. Hukum internasional II, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Rudy, May, Tengku, "Administrasi dan Organisasi Internasional", edisi Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- -----, "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin", Resika, Jakarta, 2002.
- Sihbudi, Riza. Menyandera Timur Tengah. PT Mizan Publika. Jakarta. 2007.

Kamus

- Lawrens, Hasbi dan Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, Lintas Media, Jombang, 2000
- Team Pustaka Phoenix, *Phoenix Pocket Dictionary*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2006.

Internet

http://catatanmap.wordpress.com/2012/07/22/konflik-maroko-versus-sahara-barat-pola-kolonialisme-melestarikan-wilayah-tak-bertuan-di-jalur-sutra/

http://id.news.yahoo.com/antr/20101211/twl-maroko-dan-polisario-adakan-pembicara-bbfa48e.html

http://groups.yahoo.com/group/Sahara-update

http://rerenie.wordpress.com/2013/04/12/konflik-antara-kerajaan-maroko-dan-republik-demokratik-arab-sahrawi/

http://www.africafocus.org/docs99/wsah9901.php

http://www.aksindo.org/modules/article.php?id=832

http://www.antaranews.com/berita/1265948281/maroko-polisario-gagal-capai-perjanjian-sahara-barat

http:www.begainfo.com/vb/t3724/?language=id

http://www.foreignpolicy-infocus.org/commentary/0106wsahara.html

http://www.irinnews.org

http://www.jurnas.com/news/92431/Maroko_Nilai_Isu_Sahara_Barat_Sisa_ Perang_Dingin/1/Internasional/Eropa

http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=454:teguh-santosa-demokratisasi-di-tindouf-jalan-keluar-selesaikan-konflik-sahara-barat&catid=37:news/2012/03/08

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2009/06/26/6477/Polandia-Dukung-Otonomi-Khusus-Sahara-Barat

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2008/01/09/4491/Anggota-Kongres-AS-Dukung-Maroko

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2008/01/09/4489/LSM-Maroko-di-Dunia-Kutuk-Perbuatan-Polisario

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2008/01/08/4484/Maroko-Minta-Ijin-PBB-untuk-Menindak-Pemberontak

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2008/01/08/4483/SEPARATISME-MAROKO-Jelang-Perundingan-Ketiga,-Polisario-Menggeliat-Lagi

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2007/10/01/4080/SEPARATISME-MAROKO-Perdamaian-Terganjal-Penolakan-Sahrawi

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2007/02/02/2714/LINTAS-BENUA-Maroko-Melawan-Gerakan-Separatis

http://www.udel.edu/leipzig/texts3/eld18097.html

http://www.unic-jakarta.org/index.php/id/home-bahasa/14-bahasa-categories/infoterkini/2639-kepala-pbb-berkomitmen-untuk-negosiasi-solusi-dalamkonflik-sahara-barat